

**PENGARUH PINJAMAN BERGULIR TERHADAP
PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

SALAMATURRACHMA INSANI

NPM. 1451020117

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**PENGARUH PINJAMAN BERGULIR TERHADAP
PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu program pemerintah yang memiliki beberapa bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang fisik. Pada bidang ekonomi terdapat pinjaman bergulir dimana pinjaman ini adalah bentuk pinjaman yang dananya berasal dari pemerintah dan digulirkan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pinjaman yang pengembaliannya dengan cara angsuran. Di kota Bandar Lampung yang mendapatkan program pinjaman bergulir ada 20 Kecamatan dengan 126 kelurahan. Akan tetapi yang seharusnya pinjaman ini berjalan lancar dan dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan yang membuat kesejahteraan masyarakat meningkat seperti pada tujuan program KOTAKU ini masih ada beberapa yang tidak berjalan lancar, salah satunya yaitu kecamatan Teluk Betung Utara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pinjaman bergulir berpengaruh terhadap pendapatan KSM di kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan bagaimana pinjaman bergulir menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pinjaman bergulir terhadap pendapatan menurut perspektif ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu 226 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mendapat pinjaman bergulir dari tahun 2015-2017. Sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan sampel sebanyak 11 KSM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan koordinator program KOTAKU, Unit Pengelola Keuangan dan KSM, observasi lapangan dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* hasil uji t menunjukkan bahwa variable pinjaman bergulir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan KSM. Dimana t hitung $>$ t tabel dengan masing-masing memiliki hasil, t hitung sebesar pinjaman bergulir (2,739) dan t tabel (1,69389) dan memiliki nilai signifikan $0,010 < 0,05$ Menunjukkan bahwa variabel pinjaman bergulir memiliki pengaruh yang kecil terhadap pendapatan KSM sebesar 16,9% dikarenakan pinjaman bergulir yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan lancar, karena masih ada beberapa KSM yang pinjamannya menunggak dan kurangnya jumlah dana yang diberikan untuk pinjaman. *Kedua* terdapat 3 prinsip ekonomi Islam pada pinjaman bergulir yang ada di Program KOTAKU yaitu prinsip tertulis (*Al-Kitabah*) prinsip pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*) dan prinsip kemanfaatan (*A-Manfaat*) atau kemaslahatan (*maslahah*). Apabila pinjaman bergulir ini berjalan lancar dan jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar itu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan sehingga masyarakat akan lebih sejahtera.

Kata Kunci : Pinjaman Bergulir, Pendapatan, dan Ekonomi Islam.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PINJAMAN BERGULIR
TERHADAP PENDAPATAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
Pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk
Betung Utara Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa : **SALAMATURRACHMA INSANI**
NPM : **1451020117**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
NIP. 19651120 199203 2 002

Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP.19790514 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi denga judul : **PENGARUH PINJAMAN BERGULIR TERHADAP PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh **Salamaturrachma Insani : 1451020117**, Program studi: **Perbankan Syariah**, telah dilakukan sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


Hari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018

Waktu : 10.00 – 11.30

Tempat : Dekanat Lantai 3A

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. 

Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E. 

Penguji I : Drs. H. Nasrudin, M.Ag. 

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. 

Bandar Lampung, Desember 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Baihrudin, M.Ag

NIP: 195808241989031003

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

(Q.S Al-Baqarah ayat 282) ¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.145.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Sariyan Arpin dan Ibunda Bandiyati yang selalu senantiasa tidak pernah henti-hentinya mendoakan, berjuang, dan selalu memberikan motivasi untuk keberhasilanku, yang telah mendidik, membesarkan hingga mampu menyelesaikan studiku, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT selalu menjaga, melindungi dan melimpahkan kasih sayang-Nya, memberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan keberkahan disetiap langkahnya.
2. Kakak-kakak dan adik-adik ku tercinta, Sa'diyaturrachma Insani S.H.I, M.H., Qori Ade Mustaqim, Triyanti Az-Laila Nurul Khotimah, dan Rifda Zalfa Az-Zahria, terimakasih telah menghibur dikala lelah, memberikan motivasi dan menjadi penyemangat bagiku sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Salamaturrachma Insani, lahir pada tanggal 03 Maret 1996 di Bandar Lampung, anak kedua dari Bapak Sariyan Arpin dan Ibu Bandiyati. Berikut daftar Riwayat Pendidikan Penulis :

1. MI Hidaayatul Islaamiah selesai pada tahun 2008
2. MTs Hidaayatul Islaamiah selesai pada tahun 2011
3. MA Hidaayatul Islaamiah selesai pada tahun 2014
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Salamaturrachma Insani
NPM. 1451020117

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, tak lupa limpahan karunia serta petunjuk sehingga Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pinjaman Bergulir Terhadap Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bekal kita didunia maupun diakhirat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan sepanjang siang dan malam kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh lebih dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

- 1.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Rade Intan Lampung.
3. Ibu Heni Noviarita, S.E., M.Si dan Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak., Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberika motivasi sehingga skripsi ini selesai.

4. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
 5. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Alittyta, Meita Sari, Oktarina Wulandari, Irawati, Yurli Haryanti, Syelfi Bahtiana Putri, Dewi Nurlativa, Muthia Utriana, Nurhani Pingkan yang selalu memberikan motivasi serta semangat tiada henti untukku.
 6. Teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah D dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Perbankan Syariah angkatan 2014
 7. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
 8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah.
- Akhir kata jika ada kesalahan dan kelalian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,

2018

Salamaturrachma Insani
NPM. 1451020117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Batasan Masalah.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pinjaman.....	12
1. Jenis - Jenis Pinjaman	13
2. Peran Pinjaman Berbasis Kelompok dan Formasi Modal Sosial (<i>Beyond Micro Lending</i>)	14
3. Kebijakan Pinjaman Bergulir	16
B. Prinsip Ekonomi Islam.....	23

a. Prinsip Keadilan (<i>Al-a'dalah</i>)	25
b. Prinsip Kebaikan (<i>Al-ihsan</i>)	26
c. Prinsip al-Kifayah (<i>Sufficiency</i>)	26
d. Prinsip Pertanggungjawaban (<i>al-Mas'uliyah</i>)	27
e. Prinsip Keseimbangan atau Prinsip <i>Wasathiyah</i> (<i>al-I'tidal</i> , Moderat, Keseimbangan)	27
f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (<i>Ash-shidiq</i>)	27
g. Prinsip Kemanfaatan (<i>A-Manfaat</i>) atau kemaslahatan (<i>maslahah</i>)	28
h. Prinsip Tertulis (<i>Al-Kitabah</i>)	29
C. Hutang Piutang (<i>al-Qard</i>)	33
1. Landasan Utang Piutang	34
2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	36
D. Kesejahteraan	38
1. Kesejahteraan Menurut Islam	38
E. Pendapatan	42
1. Jenis dan Sumber Pendapatan	46
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	47
F. Akuntansi Keuangan	49
1. Pengertian Akuntansi Syariah	49
2. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah	51
3. Tujuan Akuntansi Syariah	51
4. Perbedaan Akuntansi Syariah	52
G. Tinjauan Pustaka	54
H. Kerangka Berfikir	56
I. Hipotesisi	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Sumber Data.....	60
D. Populasi dan Sampel	60
E. Definisi Operasional Variabel.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Metode Analisis Data.....	63
1. Uji Normalitas.....	63
2. Analisis Regresi Linear Sederhana	64
3. Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)	64
4. Uji Hipotesis.....	65

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian	66
B. Deskripsi Data.....	73
C. Karakteristik Responden.....	76
D. Analisis Data.....	76
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah Tahun 2012-2017	3
1.2 Dana Pinjaman Bergulir di Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2015-2017.....	8
1.3 Tinjauan Pustaka	50
2.1 Data Umur dan Jenis Kelamin	65
2.2 Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin	66
2.3 Data Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin	66
2.4 Jumlah Sarana Peribadatan	67
2.5 Data Penduduk Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin	68
2.6 Jumlah Prasarana Pendidikan.....	68
2.7 Jumlah Sarana Kesehatan.....	69
2.8 Jenis Kelamin.....	70
2.9 Usia	71
2.10 Status Pendidikan.....	72
2.11 Pekerjaan.....	73
2.12 Hasil Uji Normalitas	74
2.13 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	75
2.14 Hasil Koefisien Determinasi	77
2.15 Hasil Uji t.....	78
2.16 Jumlah Pendapatan.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Pemberian Pinjaman Bergulir	23
1.2 Struktur Kepengurusan Lambaga Keswadaya Masyarakat (LKM)	24
1.3 Kerangka Berfikir	52
1.4 Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat Tahun 2015-2017.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Uji Normalitas
2. Lampiran 2 : Uji Regresi Linier Sederhana
3. Lampiran 3 : Uji Hipotesis
4. Lampiran 4 : Data Pinjaman dan Pendapatan
5. Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Lampiran 6 : Surat Riset
7. Lampiran 7 : SK Seminar Proposal
8. Lampiran 8 : Berita Acara Munaqosah
9. Lampiran 9 : Dokumentasi Foto
10. Lampiran 10 : Kartu Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami permasalahan dan mengembangkan judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul yang saya ambil yaitu :**“PENGARUH PINJAMAN BERGULIR TERHADAP PENDAPATANDALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”**Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat *asosiatif* yakni suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lain.²
2. Pinjaman dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian diganti.³


²Sugiono, Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2001), h.7.

³Arif Munandar Riswanti, *Khazanah Buku Pintar Islam 1*, (Bandung: Mizan, 2010), h.98.

3. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai usaha, yang merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan uang tunai atau pendapatan (keuntungan) usaha merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua biaya.⁴

Berdasarkan uraian istilah diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah menjelaskan pinjaman bergulir yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang dapat berpengaruh pada pendapatan, dan bagaimana pinjaman bergulir dalam perspektif ekonomi islam.

B. Latar Belakang



Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 237.641.326 jiwa.⁵ Sebagai salah satu negara berkembang di Asia dengan jumlah penduduk yang tinggi, pembangunan perekonomian menjadi salah satu bagian dari pembangunan Nasional dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi. Pada tahun 2017 ada sebanyak 27.770.000 penduduk miskin di

⁴Budi Hartono, *Prinsip Analisis Ekonomi (Teori dan Aplikasi Peternakan)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), h.128.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat per Provinsi* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), h. 6.

Indonesia.⁶Dengan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia maka ini menjadi sebuah hal yang harus pemerintah tangani dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan yang ada saat ini, berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun masalah kemiskinan masih juga melanda bangsa Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2012 (Septe)	240,11	990,05	1.230,16	11,88	16,96	15,65
2013 (Maret)	235,47	939,88	1.175,35	11,59	15,99	14,86
2013 (Sept)	224,81	919,95	1.144,76	10,89	15,62	14,39
2014 (Maret)	230,63	912,28	1.142,92	11,08	15,41	14,28
2014 (Sept)	224,21	199,73	1.143,93	10,68	15,46	14,21
2015 (Maret)	233,27	930,22	1.163,49	10,94	15,56	14,35
2015 (Sept)	197,94	902,74	1.100,68	9,25	15,05	13,53
2016 (Maret)	233,39	936,21	1.169,60	10,53	15,69	14,29
2016 (Sept)	227,44	912,34	1.139,78	10,15	15,24	13,6
2017 (Maret)	228,32	903,41	1.131,73	10,03	15,08	13,69
2017 (Sept)	211,97	871,77	1.083,74	9,13	14,56	13,04

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2017 dan Susenas September 2017⁷

Penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2017- September 2017, lebih tinggi terjadi di daerah urban (perkotaan) yang turun 7,16 persen (16,35 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (perdesaan) turun 3,50 persen (31,54 ribu jiwa).

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)Program ini berawal

⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), h. 189.

⁷Perpustakaan BPS Kota Bandar Lampung, *Angka Kemiskinan Lampung*, September 2017.

dari P2KP Akan tetapi melihat banyaknya kekurangan dalam program ini maka tahun 2007 dirubah menjadi PNPM Mandiri yang dibagi menjadi dua yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan dan pada tahun 2015 di ubah menjadi P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan), sekarang program ini menjadi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).⁸

Pada Program KOTAKU ini terdapat beberapa Bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Sosial, dan Bidang Fisik. Pada Bidang Ekonomi terdapat Pinjaman Bergulir dimana pinjaman ini adalah bentuk pinjaman yang dananya berasal dari pemerintah dan digulirkan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pinjaman yang pengembaliannya dengan cara angsuran, pinjaman ini juga didampingi dan difasilitasi oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diawasi oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan). Di kota Bandar Lampung yang mendapatkan program pinjaman bergulir ada 20 Kecamatan dengan 126 kelurahan. Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin melalui pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya sehingga bisamemperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro.

⁸ “Sejarah P2KP”, <http://www.p2kp.org/>, (diakses pada 27 Maret 2018). dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada. Dengan adanya program pemerintah yang ada di masyarakat diharapkan dapat membantu perekonomian yang ada, dengan pinjaman yang digulirkan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁹ Pada kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁰ Sedangkan pendapatan atau laba adalah perbedaan antara pendapatan kotor (*gross income*) dan biaya operasi (*operating cost*). Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai usaha, yang merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan uang tunai atau pendapatan (keuntungan) usaha merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua biaya.¹¹ Pendapatan juga merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.¹²

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.185.

¹⁰BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.230.

¹¹Budi Hartono, *Op. Cit.*, h.128.

¹²Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet. Keempat, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), h.42.

Menurut Arifin Sitio & Halomoan Tamba dalam penelitian ekonomi, kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.¹³ sehingga dari teori diatas dapat dilihat bahwa pendapatan riil dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang ataupun masyarakat.

Dalam islam kesejahteraan yang dapat dicapai bila manusia telah Allah SWT jadikan khalifah di bumi ini berusaha dengan maksimal seperti dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya : *"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Q.S Hud (11) : 61)*¹⁴

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

Artinya : *"Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan disana Kami sediakan (sumber)penghidupan untukmu. (tetapi)sedikit sekali kamu bersyukur"* (Q.S Al-Araf (7) : 10)¹⁵

¹³Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi :Teori dan Praktek*, (Erlangga: Jakarta,2001), h.19.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.306

¹⁵*Ibid.*,h.

Manusia bukan hanya diberi segala kemampuan tetapi juga sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupannya oleh Allah SWT tidak lain diperuntukan untuk mensejahterakan kehidupan di bumi yang akan berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan individu saja.

Pinjaman bergulir ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan seperti yang telah dijelaskan pada ayat diatas bahwa Allah SWT telah memberikan manusia kemampuan untuk mensejahterakan kehidupan di bumi yang akan berdampak pada kehidupan di akhiratnya.

Sedangkan “Pinjaman Bergulir” menurut program KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Unit Pengelola Keuangan yang menjadi acuan bagaimana pinjaman ekonomi itu berjalan lancar atau tidak. Ketika UPK mampu memutar pinjaman kepada masyarakat dengan maksimal maka ini akan menjadi modal sosial yang besar. Sehingga dengan lancarnya UPK (Unit Pengelola Keuangan) memutar pinjaman kepada masyarakat seharusnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kecamatan dan kelurahan

yang mendapatkan program Pinjaman Bergulir berjalan lancar.¹⁶ Sehingga apakah hal itu berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Salah satunya yaitu pada Kecamatan Teluk Betung Utara, pada kecamatan ini ada beberapa KSM yang mengalami tunggakan, sehingga jumlah pinjaman yang digulirkanpun mengalami kenaikan dan penurunan sehingga UPK (Unit Pengelola Keuangan) lebih berhati-hati dan selektif lagi untuk menggulirkan dananya.

Tabel 1.2
Dana Pinjaman Bergulir di Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2015-2017

No	Nama Kelurahan	KSM	2015	2016	2017
1	Kupang Raya	54	Rp.375.000.000	Rp. 437.000.000	Rp.267.500.000
2	Gulak Galik	52	Rp. 183.000.000	Rp. 233.500.000	Rp. 192.500.000
3	Kupang Kota	26	Rp. 100.000.000	Rp.115.000.000	Rp. 81.000.000
4	Pengajaran	95	Rp. 347.000.000	Rp.643.500.000	Rp. 576.510.000
	Jumlah	227	Rp. 1.005.000.000	Rp. 1.429.000.000	Rp. 1.117.510.000

Sumber : (data diolah) Unit Pengelola Keuangan Koordinator Kota Bandar Lampung

Dengan adanya program KOTAKU pada bidang Pinjaman Bergulir apakah akan berpengaruh pada pendapatan kelompok swadaya masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan bagaimana pinjaman bergulir dalam perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pinjaman Bergulir ini kedalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pinjaman Bergulir terhadap Pendapatan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”**.

¹⁶ Ervina Santry, wawancara dengan Askot Ekonomi Program KOTAKU, Koordinator kota Bandar Lampung, 28 Maret 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pinjaman bergulir berpengaruh terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat?
2. Bagaimana pinjaman bergulir dalam perspektif ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pinjaman bergulir berpengaruh terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat dan bagaimana pinjaman bergulir dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pinjaman bergulir yang ada di masyarakat pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktik penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Masyarakat tentang pengaruh yang ada pada pinjaman bergulir terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

F. Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah meneliti tentang Program Pinjaman Bergulir Pemerintah apakah berpengaruh terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat pada Program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Populasi sebanyak 226 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terdaftar pada Program KOTAKU pada tahun 2015-2017 di Kecamatan Teluk Betung Utara yaitu Kelurahan Kupang Raya, Gulak Galik, Kupang Kota, dan Pengajaran. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang masih terdaftar pada Program KOTAKU pada Tahun 2015-2017
2. KSM yang diberikan pinjaman rutin dari tahun 2015-2017
3. KSM yang membayar angsuran rutin perbulan
4. KSM yang terdapat 5 anggota dalam satu kelompok

Sehingga dari kriteria diatas maka sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 11KSM. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel X yaitu pinjaman bergulir yang dilihat dari Jumlah Pinjaman dan indikator pada variabel Y yaitu pendapatan yang dilihat pada pendapatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dari pendapatan tahun 2015-2017.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud memudahkan dalam pembahasan. Hal ini penulis lakukan agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, pada bab ini membahas tentang telaah pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori dijadikan pedoman untuk menentukan metode penelitian yang dilakukan.

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini memuat tentang metode penelitian dan variabel penelitian yang hasilnya dianalisis dan dibahas pada bab empat.

Bab empat hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kecamatan Teluk Betung Utara, penyajian, dan analisis data hasil penelitian.

Bab lima penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab sebelumnya, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinjaman

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang atau uang dengan membayar dengan cara di cicil atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang dikenal dengan istilah pinjaman.¹⁷ Kredit merupakan peminjaman uang yang dilakukan oleh seseorang baik kepada individu maupun lembaga dengan suatu kesepakatan dan pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur. Menurut Rollin G. Thomas dalam pengertian umum kredit didasarkan atas kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.¹⁸

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Sedangkan secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian diganti.¹⁹

Sedangkan “Pinjaman Bergulir” menurut program KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran.²⁰ Kegiatan

¹⁷Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.81

¹⁸Rachmat Firdaus ,Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.2.

¹⁹Arif Munandar Riswanti, *Op. Cit*, h.98.

²⁰“Pengertian Pinjaman Bergulir”, <http://kotaku.pu.go.id/>, (diakses pada 27 Maret 2018). Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

pinjaman bergulir ini merupakan pemberian pinjaman skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya program pinjaman bergulir ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan pendapatan dari pinjaman bergulir sehingga masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

1. Jenis-Jenis Pinjaman

Terdapat beberapa jenis-jenis pinjaman sebagai berikut :

a. Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional atau merupakan pinjaman yang digunakan sebagai modal usaha.²¹

b. Pinjaman Investasi

Pinjaman investasi (*Investment loan*) adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan modal usaha atau alat-alat produksi yang menunjang kegiatan operasional.²²

c. Pinjaman Konsumtif

Pinjaman Konsumtif (*consumer loan*) adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.²³

²¹ Martino Wibowo, Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017), h.79.

²²*Ibid*, h.80.

2. Peran Pinjaman Berbasis Kelompok dan Formasi Modal Sosial (*Beyond Micro Lending*)

Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki kebutuhan yang sama, kepentingan, dan seperangkat tujuan bersama, ada ketergantungan dan saling mempengaruhi, ada interaksi tatap muka, memiliki struktur dan kerangka kerja tertentu, terdapat pernyataan dari masing-masing individu bahwa mereka adalah anggota kelompok dan mampu bertindak dalam kerangka cara kerja yang telah disepakati.²⁴

Bentuk lain dari kelompok yang berkaitan dengan lingkungan kerja lembaga non-pasar adalah kelompok swadaya (*Self-help group*). *Self Help Group* (SHG) adalah kelompok yang berusaha untuk membantu diri mereka sendiri dalam bentuk kelompok. Kelompok tersebut dalam bentuk asosiasi tabungan dan pinjaman yang sudah sangat lama dipraktikkan dan lazim ditemukan di dunia. Di India SHG merupakan hal yang unik untuk intermediasi keuangan. SHG diharapkan bisa memperluas layanan keuangan kepada masyarakat miskin, dan memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan pedesaan.²⁵

Keberadaan modal sosial dalam masyarakat miskin tidak hanya sebagai sarana untuk mengatasi banyaknya hambatan memiliki akses pelayanan keuangan, tetapi juga sumber atau faktor penentu bagi keberhasilan operasional mekanisme pinjaman yang berbasis

²³Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* “Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah”(Jakarta: Qisthi Press, 2016), h.81.

²⁴Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h.224.

²⁵*Ibid*, h.225.

kelompok (*group lending model*).²⁶ Model pinjaman berbasis kelompok oleh lembaga non-pasar, hubungan inter-personal dan kerja sama di antara anggota kelompok, dapat menjadi jaminan sosial (*social collateral*).²⁷

Elemen yang paling penting dari sistem pinjaman berbasis kelompok adalah tanggung rentengnya (*joint liability*) dan sejauh mana pemberian pinjaman berinteraksi dengan kelompok secara keseluruhan atau bahkan dengan masing-masing individu anggota.

Dalam program pinjaman berbasis kelompok, fungsi penyaringan, pemantauan, dan jaminan pembayaran pinjaman sebagian besar ditransfer dari agen bank kepada peminjam atau kelompok itu sendiri. Stiglitz dan Varian membahas keuntungan yang dirasakan dari aksi kolektif dalam penyaringan calon peminjam dan pemantauan peminjam. Insentif untuk penyaringan dan pemantauan tindakan sesama anggota kelompok, timbul dari adanya sistem tanggung renteng dan potensi kehilangan kesempatan mendapatkan akses pinjaman di masa depan.²⁸

Pinjaman berbasis kelompok mungkin tidak menjamin tingkat pengembalian tinggi setiap saat. Pertama, karena risiko *default* pinjaman individu dijamin oleh rekan-rekannya dalam kelompok. Maka, anggota dapat memilih proyek berisiko, dibanding dengan proyek yang dipilih dalam kasus kontrak individu. Dan, karena hal itu meningkatkan kemungkinan tidak terjadinya *default*. Hal ini karena peminjam individu

²⁶*Ibid*, h.221.

²⁷*Ibid*, h.229.

²⁸*Ibid*, h.230.

mungkin mengandalkan anggota lain untuk membayar pinjamannya dalam upaya mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.²⁹

3. Kebijakan Pinjaman Bergulir

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2.

Adapun kepengurusan Lembaga Kswadaya Masyarakat (LKM) yang tetap berlaku walaupun dengan pergantian nama program adalah sebagai berikut :³⁰

a. Tujuan pinjaman bergulir

- 1) Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya,
- 2) Untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelanjakan mereka dalam hal mengelola pinjaman menggunakannya secara benar.

²⁹*Ibid*, h.232.

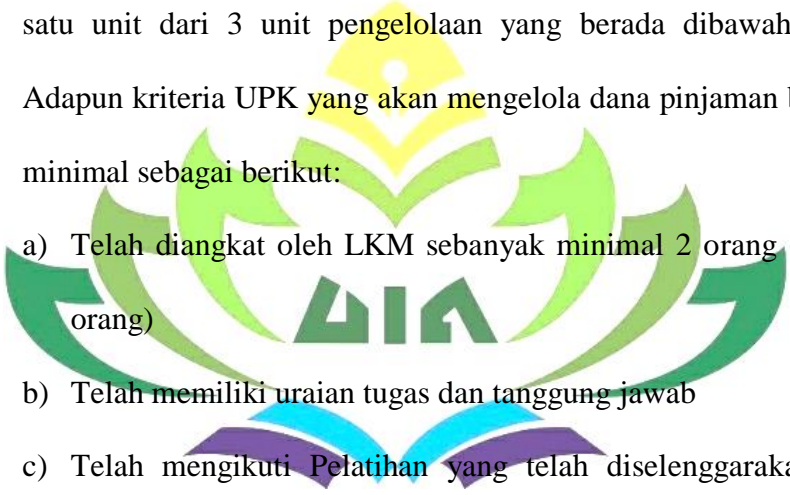
³⁰Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan Program Ekonomi Bergulir* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2010), h.3.

b. Ketentuan dasar pinjaman bergulir

Adapun aturan dasar untuk pinjaman bergulir antara lain mengenai kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan peminjam, skim/ketentuan pinjaman bergulir dana pinjaman, pelayanan pinjaman bergulir dan pendampingan.

1) Kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir

Lembaga yang langsung mengelola kegiatan pinjaman bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK).UPK merupakan salah satu unit dari 3 unit pengelolaan yang berada dibawah LKM. Adapun kriteria UPK yang akan mengelola dana pinjaman bergulir minimal sebagai berikut:

- 
- a) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang)
 - b) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab
 - c) Telah mengikuti Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Program PNPM Mandiri Perkotaan/KOTAKU
 - d) Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir.
 - e) Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan penandatanganan 3 orang
 - f) Telah memiliki sistem Pembukuan yang berlaku di Mandiri Perkotaan/KOTAKU

2) Kelayakan peminjam

Adapun ketentuan dan kriteria peminjam baik kelayakan KSM peminjam dan anggotanya adalah sebagai berikut :³¹

- a) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
- b) Minimal 30% peminjam adalah perempuan.
- c) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang
- d) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerjanya pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil *chanelling* dengan kebijakan pinjaman yang jelas.
- e) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin (tidak semata-mata untuk pinjaman).
- f) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokrasi, partisipatif, transparatif, transparan, dan kesetaraan.
- g) Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, rencana usaha, kewirausahaan, dan

³¹*Ibid*, h.10.

pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator LKM/UPK.

- h) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
 - i) Semua anggota KS telah mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan sebagai dana tanggung renteng dan bersedia aktif untuk menggalang kegiatan berkelompok secara berkelanjutan
 - j) Anggota dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota lain, juga memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
 - k) Belum pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan.
- 3) SKIM/Ketentuan umum pinjaman bergulir³²
- a) Tujuan penggunaan pinjaman membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja.
 - b) Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 1.000.000,-/Orang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar pinjaman. Dan pinjaman berikutnya tergantung pada

³²*Ibid*, h.14.

catatan pembayaran kembali dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-.

- c) Jasa pinjaman sebesar 1.5%/Bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula dan juga dapat dikembangkan sesuai kesepakatan LKM/BKM dengan masyarakat.
 - d) Jangka waktu pinjaman 3 sampai 12 bulan dan frekuensi pinjaman masing-masing ditetapkan maksimal 4 kali.
 - e) Angsuran pinjaman maksimal bulanan tanpa adanya tenggang waktu kecuali ketentuan lain seperti pinjaman kepada petani yang musiman maka bisa dilakukan musiman maka jasa pinjaman dibayar secara bulanan.
- 4) Sumber dana pinjaman bergulir dapat berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan sumber dana utama, APBN, dan berasal dari pihak swasta, dana dari swadaya masyarakat, pemupukan modal berasal dari keuntungan, dan dari sumber lainnya.

5) Kolektibilitas Pinjaman

Kolektibilitas pinjaman adalah cerminan dari pengelolaan pinjaman bergulir, dengan kolektibilitas dapat dilihat baik buruknya kualitas dan tingkat resiko daripada pinjaman. Pengelompokan dalam kolektibilitas pinjaman terdiri dari Pinjaman

Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) dengan kriteria sebagai berikut :³³

a) Pinjaman Lancar (Kolektibilitas 1)

Adalah pinjaman yang tidak terdapat tunggakan

b) Pinjaman Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Adalah pinjaman yang terdapat unsur tunggakan < 3 s/d 6 bulan / kali angsuran

c) Pinjaman Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Adalah pinjaman yang terdapat unsur tunggakan ≥ 3 s/d 6 bulan / kali angsuran

d) Pinjaman Diragukan (Kolektibilitas 4)

Adalah pinjaman yang terdapat unsur tunggakan > 6 s/d 9 bulan / kali angsuran

e) Pinjaman Macet (Kolektibilitas 5)

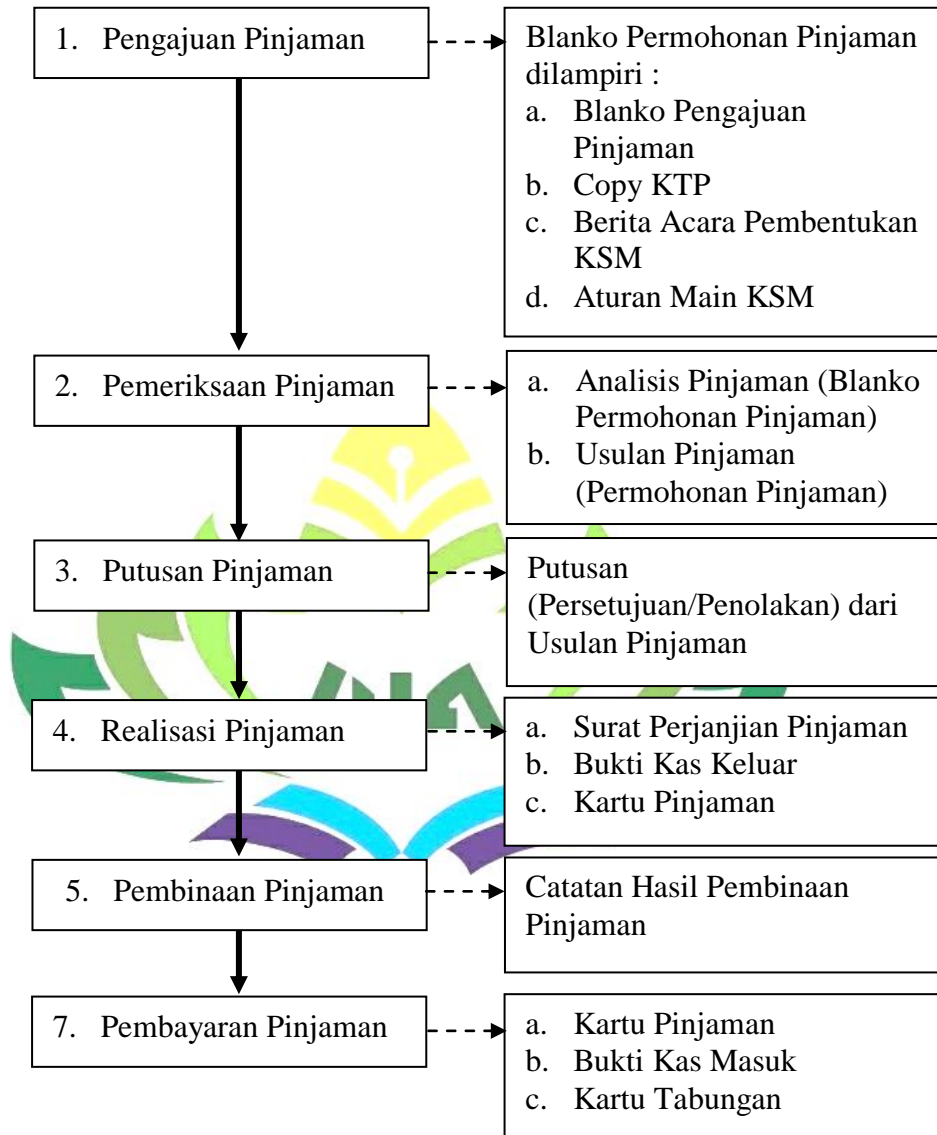
Adalah pinjaman yang terdapat unsur tunggakan > 9 /kali angsuran

- 6) Pelaksanaan pendampingan, kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk *coaching*, konsultasi, membantu petugas sampai bisa melakukan secara mandiri, perbaikan kurang dan salah, membimbing kemampuan petugas dan masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan oleh fasilitator dan senior fasilitator, asisten

³³*Ibid*, h.15.

koordinator kota (askorkot) dan koordinator kota (korkot), tenaga ahli kredit mikro/manajemen keuangan, dan relawan.

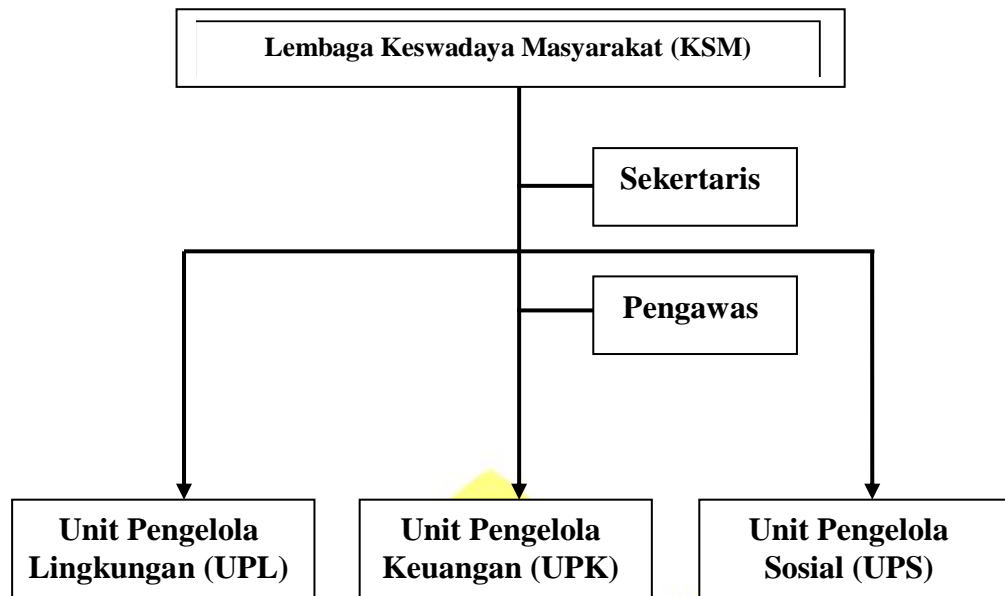
Bagan 1.1 Skema Pemberian Pinjaman Bergulir



Sumber : Buku Petunjuk teknis pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.³⁴

³⁴*Ibid*, h.38.

Bagan 1.2 Struktur Kepengurusan Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM)



Sumber : Buku Petunjuk teknis pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.³⁵

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola dana pinjaman yang memiliki tanggung jawab keberlangsungan Program Pinjaman Bergulir.

B. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar antara lain :

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna

³⁵*Ibid*, h.7.

memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain.

- 2) Islam mungkin kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendaatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seseorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima, upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT. dalam Al-Qur'an.³⁶
- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditunjukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.74.

7) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) ata berbagai bentuk pinjaman, apakah itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain.³⁷

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariat bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariat menurut para akademisi dan praktis ekonomi syariat yang ditemui di berbagai literatur, antara lain :³⁸

a. Prinsip Keadilan (*Al-'adalah*)

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kaum kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (QS. An-Nahl (16): 90)³⁹

Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman.

³⁷ *Ibid.*, h. 75.

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 377.

b. Prinsip Kebaikan (*Al-ihsan*)

Prinsip kebaikan adalah prinsip pemberian manfaat kepada orang lain yang lebih daripada hak orang atau *ihsan* adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Dalam ekonomi syariat prinsip *ihsan* menjadi sangat penting karena bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi kepada keuntungan (*Profit*) semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek duniawi tetapi juga aspek ibadah (*ukhrawi*). Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa bisnis harus dilandasi dengan niat saling menebar kebaikan kepada sesama baik sesama mitra bisnis maupun kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam mengajarkan, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat orang lain.

c. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*) dan pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.⁴⁰

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga

⁴⁰ *Ibid.*, h.6.

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.⁴¹

d. Prinsip al-Kifayah (*Sufficiency*)

Prinsip ini memiliki tujuan pokok untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana ekonomi Islam bisa mensejahterakan pribadi-pribadi pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkannya juga harus mampu mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kaya sendiri sementara ada orang di sekelilingnya hidup di bawah garis kemiskinan.

e. Prinsip Keseimbangan atau Prinsip Wasathiyah (*al-I'tidal*, Moderat, Keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-shidiq*)

Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal tersebut tercermin dalam :⁴²

- 1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

⁴¹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.63.

⁴²*Ibid.*, h.7.

- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang
 - 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial prinsip ini menekankan kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu
 - 4) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang
 - 5) Prinsip suka sama suka, saling rela (*antaradhin*).
 - 6) Prinsip tidak adanya paksaan
- g. Prinsip Kemanfaatan (*A-Manfaat*) atau kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip ini dimaksudkan akad yang dilakukan oleh para pihak dalam ekonomi syariat bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Kemanfaatan tersebut antara lain berkenaan dengan objek akad, tidak semua objek dalam pandangan islam dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/ mafsadhat*, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan atau yang tidak memberi manfaat apalagi membahayakan. Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad adalah yang dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayib*).

Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan (*maslahah*) adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepasnya daripada kerusakan. *Maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. dalam arti umumnya setiap segala

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Teori *masalah* berasal dari teori hukum islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normative belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Al-Quran dan Hadis) maupunn undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangkamemelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan denga tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Jamaludin Abdurrahman menyebutkan *masalah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialan semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁴³ Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁴⁴

h. Prinsip Tertulis (*Al-Kitabah*)

Prinsip ini didasari dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2)282 dan Al-Baqarah (2)283. Kedua ayat tersebut

⁴³Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.158.

⁴⁴Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.117.

mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*).Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit).⁴⁵

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasannya yang dimaksud piutang adalah meminjam atau memberi pinjaman yang merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan beberapa aturan kepada hamba-Nya apabila mereka bermuamalah dengan cara utang piutang dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah menulis perjanjian dengan menghadirkan dua orang saksi yang mampu bersifat adil.⁴⁶ Ayat diatas juga memberikan informasi kepada kita tetang siapa saja yang melakukan pencatatan harus dilakukan dengan jujur dan benar. Untuk mencapai kebenaran dan kejujuran dalam proses pencatatan akuntansi kita membutuhkan sebuah saksi baik itu berupa bukti transaksi maupun pihak ketiga yang dapat dipercaya.⁴⁷

Menurut Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar Juz 3 tentang surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut :

“perhatikan tujuan ayat yang menyatakan kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita selalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita selalu percaya

⁴⁵ Amran Suadi, *Op. Cit.*, h.158.

⁴⁶ Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'I* (Jakarta: Almahira, 2001), h.522

⁴⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.37

mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah”⁴⁸.

Beliau mengungkapkan secara jelas bahwa wajibnya memelihara tulisan/mencatat bukan karena tidak percaya tetapi karena menjaga jika terjadi suatu dikemudian hari agar tidak ada konflik. Dan perintah inilah yang selalu diabaikan ummat Islam sekarang. Bahkan yang lebih parah sudah sampai pada suatu situasi seolah-olah menuliskan transaksi seperti ini menunjukkan kurangnya kepercayaan satu sama lain, padahal menulis, mencatat, utang piutang merupakan perintah Allah.

Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Harahap yaitu untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (bertanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan/perusahaan diridhoi Allah serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama “*al-falah*”.⁴⁹

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja. Hendaknya yang memberi utang mengutarakan maksudnya agar ditulis dan tidak mengurangi

⁴⁸*Ibid*, h.37.

⁴⁹*Ibid*, h.38.

sedikitpun hak orang lain demi kepentingan pribadi.⁵⁰ Dari ayat tersebut terdapat *pelajaran* yang dapat dipetik yaitu :⁵¹

1. Transaksi bukan tunai, janganlah ditegaskan atas janji lisan melainkan dengan tertulis dan mengambil kesaksian.
2. Dengan jalan membayar utang tepat pada waktunya, berarti kita telah memelihara kepercayaan dan keamanan ekonomi masyarakat terjaga.

Selain itu prinsip dan tujuan dalam sistem ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam meliputi :⁵²

- 1) *Tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas perekonomian tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh tanggung jawab.
- 2) *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi melahirkan sikap, berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. prinsip ini mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan

⁵⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi, terj. Bahrin Abubakar*, (Surabaya: CV. Aisyiah, 1998), h.127.

⁵¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h.138.

⁵² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit.*, h.65.

kemakmuran kelompok atau orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindunginya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Sistem ekonomi islam bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.⁵³

C. Hutang Piutang (*al-Qard*)

Dalam fiqih *mu'amalah*, hutang piutang disebut "*al-dayn*" yang terkait dengan istilah *al-Qard* yaitu hutang piutang dan dalam bahasa Indonesia disebut pinjaman. Secara bahasa *al-Qard* yaitu *Qard* yang diambil dari kata *qarad-yaqridu-qardan* artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Menurut terminologi *al-Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk

⁵³*Ibid.*, h.66.

dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.⁵⁴

Menurut *shara al-Qard* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT karena *al-Qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.⁵⁵

Menurut ulama Hanafiah, *al-Qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.⁵⁶

Menurut ulama malikiyah, *al-Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.⁵⁷ Dari beberapa pengertian *al-Qard* di atas, dapat disimpulkan *al-Qard* yaitu menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan mengembalikannya sesuai dengan apa yang dipinjamkan.

1. Landasan hutang piutang (*al-Qard*)

Landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang (*al-Qard*) terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.274.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), h.181.

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.374.

⁵⁷Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.150.

Artinya : “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan,, maka berilah tenggang sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ” (Q.S Al-Baqarah ayat (2): 280)⁵⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan ikhlas dan rela karena Allah, sama dengan memberikan potongan walaupun hutang itu masih harus mengganti dilain waktu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... ” (Q.S Al-Baqarah ayat (2):282)⁵⁹

Penjelasan dari ayat diatas yaitu dalam hutang piutang (*al-Qard*) hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan oleh orang lain.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهٗ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya : “ barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan megembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia ” (Q.S al-Hadid ayat (57): 11)⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala kepada orang yang meminjamkan.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.59.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.59.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.786.

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*al-Qard*)

Rukun dan syarat hutang piutang (*al-Qard*) yaitu :

a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*)

Pihak yang meminjam (*Muqtarid*) harus merupakan orang *ahliyah mu'amalah*, yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.⁶¹

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqid*)

Syarat *muqid* (pihak yang memberikan pinjaman) antara lain :

- 1) *Ahliyat at-tabarru'* (layak sosial), artinya orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat Islam.
- 2) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan), *Muqid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi pihak ketiga.⁶²

c. Barang yang dihutangkan (*Muqtarad/ma'qud 'alaih*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, obyek akad *al-Qard* sama dengan akad salam baik berupa barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun

⁶¹Dumairi Nor, Sufandi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h.103.

⁶²*Ibid.*, h.102.

barang yang tidak ada persamaannya di pasar (*qimiyat*) seperti hewan, barang dagang dan barang yang dihitung.⁶³

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat barang yang dihutangkan adalah :

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan
 - 2) Dapat dimiliki
 - 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
 - 4) Telah ada pada waktu perjanjian
- d. Ucapan serah terima (*Sighat Ijab Qabul*)

Akad adalah semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.⁶⁴

Sighat akad sangat penting dalam rukun akad, karena dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad, *Sighat* akad dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.⁶⁵

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.278.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII press, 2000), h.65.

⁶⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo, 2003), h.104.

D. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”.Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*Catera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran hingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁶⁶

1. Kesejahteraan Menurut Islam

Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia.Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yakni dijadikan sebagai khalifah atau penguasa (pengatur) bumi.Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah agar memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjukNya.Petunjuk yang dimaksud adalah agama (Islam).

Menurut Quraish Shihab sejahtera adalah pangan, papan, sandang, yang diistilahkan tidak lapar dahaga, telanjang, dan kepanasan semua itu telah terpenuhi. Jadi untuk masa sekarang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga dan bahkan lingkungan. Dengan demikian untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dapat

⁶⁶Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.8.

dicapai oleh diri, keluarga, makanan dan minuman yang cukup untuk musim kemarau dan penghujan serta perumahan yang memenuhi syarat.⁶⁷

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Hal ini tak lain karena manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang beriman (Q.S At-Taubah (9): 71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ٧١

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain....”* (Q.S At-Taubah (9): 71)⁶⁸

Antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dan yang lain. Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan perbedaan itulah setiap manusia


⁶⁷M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h.169-172.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.266.

dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara berbeda-beda⁶⁹

Kesejahteraan (*falah*) dalam ekonomi islam berasal dari kata *Al-fallah* secara bahasa bermakna *Zhafarah bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *alfalah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁷⁰

Menurut ekonomi Islam kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 
- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
 - b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.⁷¹

Kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti

⁶⁹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op. Cit.*, h.96.

⁷⁰Warkum Sumito, *Op. Cit.*, h. 42.

⁷¹*Ibid*, h.17.

:terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.⁷²

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti meliputi : kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁷³

a. Prioritas Utama

Ad-Dharuriyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum.

b. Prioritas Kedua

Al-Hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan.

c. Prioritas Ketiga

Tahsiniyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.

⁷²Ilyas Alimuddin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, diakses pada <http://makasar.tribunnews.com>, (diakses pada tanggal 03 April 2018)

⁷³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.62.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*daruri*), sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁷⁴

E. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁷⁵ Pada kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁷⁶ Sedangkan pendapatan atau laba adalah perbedaan antara pendapatan kotor (*gross income*) dan biaya operasi (*operating cost*). Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai usaha, yang merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan uang tunai atau pendapatan (keuntungan) usaha merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua

⁷⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.*,h.89.

⁷⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h.185.

⁷⁶BN. Marbun, *Op. Cit.*,h.230.

biaya.⁷⁷ Pendapatan juga merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.⁷⁸

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Menurut Reksoprayitno pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁷⁹

Menurut pengertian Akuntansi Keuangan, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Meskipun demikian, ada perbedaan antara pengertian pendapatan untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jasa pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa, pendapatan pada perusahaan dagang diperoleh dari penjualan barang dagang,

⁷⁷Budi Hartono, *Op. Cit.*, h.128.

⁷⁸Warkum Sumito *Op. Cit.*, h.42.

⁷⁹Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.79.

sedangkan pendapatan perusahaan manufaktur berasal dari penjualan produk selesai.⁸⁰

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah baran dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).⁸¹

Menurut Arifin Sitio & Halomoan Tamba dalam penelitian ekonomi, kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.⁸²

Tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dapat diketahui melalui perhitungan pendapatan nasional. Jika nilai pendapatan nasional semakin tinggi, tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara semakin tinggi pula. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita Negara yang bersangkutan.⁸³

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya satu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa

⁸⁰M. Fuad, et. al., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2006), h.168.

⁸¹Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Op. Cit.*, h.20.

⁸²*Ibid.*, h.19.

⁸³Bambang Widjajanta, et. al., *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), h.106.

kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relative tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁸⁴

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah.⁸⁵

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dengan jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang/jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat pula.⁸⁶

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal

⁸⁴Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireue Aceh*, Vol. IV No.7:9.

⁸⁵Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.3.

⁸⁶*Ibid.* h.20.

yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatan.⁸⁷

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.⁸⁸

1. Jenis dan Sumber Pendapatan

Menurut Sumardi dan Evers dalam Rokhana membedakan pendapatan sebagai berikut yaitu :

a. Pendapatan yang berupa uang

Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontrak prestasi, sumber-sumber utamanya adalah :

- 1) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lemburan dan kerja kadang-kadang.
- 2) Dari usaha sendiri, komisi dan penjualan dari kerajinan rumah.

⁸⁷ Mahyu Danil, *Op. Cit.*, h.9.

⁸⁸ *Ibid.*, h.9.

- 3) Dari hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah
- 4) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

b. Pendapatan yang berupa barang

Pendapatan berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan berupa :

- 1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.
- 2) Beras yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati
- 3) Penerimaan yang merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah atau pemberian uang.⁸⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

- a. Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi :⁹⁰

⁸⁹Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1 No.1, Februari 2013, Dewi Irawati, et. al., h.4.

⁹⁰Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.150.

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
 - 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar factor produksi.
 - 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.
- b. Menurut swasta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain:

1) Kondisi dan kemampuan pedagang

Kemampuan pedagang dalam transaksi jual beli yaitu mampu meyakinkan para pembeli untuk membeli dagangannya dan sekaligus memperoleh pendapatan yang diinginkan.

2) Kondisi pasar

Kondisi pasar berkaitan dengan keadaan pasar tersebut, jenis pasar, kelompok pembeli yang ada dalam pasar tersebut, lokasi berdagang, frekuensi pembeli dan selera pembeli dalam pasar tersebut.

3) Modal

Setiap usaha membutuhkan modal untuk operasional usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam kegiatan penjualan semakin banyak produk yang dijual berakibat pada kenaikan keuntungan. Untuk meningkatkan produk yang

dijual suatu usaha harus membeli jumlah arang dagangan dalam jumlah besar.

4) Kondisi organisasi usaha

Semakin besar suatu usaha akan memiliki frekuensi penjualan yang semakin tinggi sehingga keuntungan akan semakin besar dibandingkan dengan usaha yang lebih kecil.

5) Faktor lain

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan berkaitan dengan periklanan dan kemasan produk.⁹¹

F. Akuntansi Keuangan

Pada umumnya akuntansi didefinisikan dengan melihat proses kegiatannya. Definisi akuntansi dilihat dari kegiatannya merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data-data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Hasil dari akhir kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dari suatu organisasi atau kesatuan ekonomi ini merupakan tujuan utama dari kegiatan akuntansi.⁹²

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa Arabnya adalah *Al-Muhasabah* berasal dari kata masdar *hassaba-yuhasbu* yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, *al-Muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu

⁹¹Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran I Edisi Ketiga*, (Yogyakarta : BPFF, 2001), h.201.

⁹²Rita Eni Purwati & Indah Nugraheni, *Siklus Akuntansi*, (Yogyakarta: Kanisusu, 2001), h.2

ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata *Ihtiasaba* yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadi perhatian” atau “mempertanggung jawabkan”.⁹³

Jika kata *muhasabah* dikaitkan dengan *ihtisab* dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (*mizan*) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya.

Selain itu, jika kita cermatisurat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi secara umum dapat disajikan, di antaranya :

- a. Tujuan utama akuntansi (*Littleton*) adalah untuk melaksanakan perthitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).
- b. APB (*Accounting Principle Board*) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi Kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.

⁹³Ali Mauludi AC, “Akuntansi Syariah Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif”, *Iqtishadia* Vol. 1 No.1 Juni 2014, h.60.

- c. AICPA (*American Institute of Certified public Accountant*) "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya".
- d. Dalam buku SBAT (*A Statement of Bank Accounting Theory*) "Akuntansi adalah proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya".
- e. Kesimpulannya, bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa. Sedangkan menurut Wiroso fungsi akuntansi adalah memberi informasi kuantitatif, bersifat finansial, mengenai suatu usaha/*Business*, sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Secara umum prinsip dasar akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :⁹⁴

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi

⁹⁴*Ibid*, h.62.

b. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu :*Pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. *Kedua*, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

3. Tujuan Akuntansi Syariah

Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Akram Khan yaitu :

- a. Penentuan laba rugi yang tepat, artinya penentuan laba rugi bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.
- b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, artinya harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan yang baik.
- c. Ketaatan kepada hukum syariah, artinya setiap kegiatan ekonomi harus dinilai halal dan haramnya.

- d. Keterikatan pada keadilan, artinya penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan yang dibuat dapat mencegah ketidakadilan antara masyarakat dengan perusahaan.
 - e. Melaporkan dengan baik, artinya informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk kepentingan segala pihak.
 - f. Perubahan dalam praktik akuntansi.⁹⁵
4. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Menurut Husein Syahtah, perbedaan kedua akuntansi itu dalam bukunya “Pokok-Pokok Akuntansi Islam”, menerangkan sebagai berikut :

- a. Para ahli modern akuntansi berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok, sementara tidak jelasnya dan belum ditentukan apa yang dimaksud dengan modal pokok (*capital*), sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti.
- b. Dalam akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua kategori yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva

⁹⁵Ikit, *Op. Cit.*, h.41.

lancar), sedangkan dalam Islam berupa barang atau *stock*, selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang.⁹⁶

G. Tinjauan Pustaka

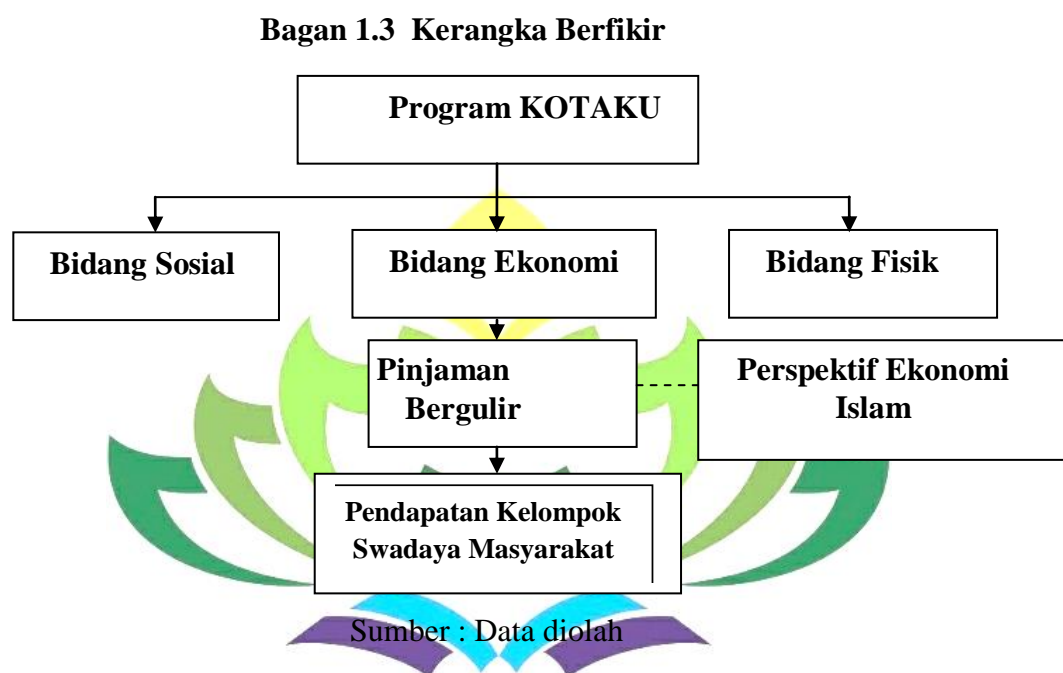
No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1	Bram Christanto	2015	Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan	Berdasarkan analisis nilai rata-rata prosentase variabel Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 78,64%. Berdasarkan analisis nilai rata-rata prosentase variabel tingkat kesejahteraan masyarakat yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 68,3%. Pengujian hipotesis yang dilakukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, karena $r_h < r_t$ atau $-0,0622 < 0,344$ (5%) atau $-0,0622 < 0,442$ (1%).
2	Dewi Irawati, et. al.	2013	Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya bantuan dari PNPM-MP dapat

⁹⁶*Ibid*, h.63.

			MP) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kota Banda Aceh	meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang ada di Kota Banda Aceh.
3	Munawar Noor, et. al.	2014	Institutional Analysis on Poverty Reduction Program in the Society : A Case Study of National Program for Community Empowerment of Independent Urban (PNPM-MP) in Semarang, Indonesia	Kelembagaan PNPM di tingkat desa dan basis (BKM / KSM) belum bisa menjadi kekuatan pendorong untuk mengurangi kemiskinan
4	Chairunnisa, et. al.	2016	Efektivitas Program Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian ada perbedaan antara pendapatan anggota KSM sebelum dan setelah menerima dana pinjaman bergulir di Kelurahan Kampung Kajian.
5	Ana Zahrotun Nihayah	2015	Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan <i>Poverty Reduction</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)	Berdasarkan hasil penelitian pemberian pinjaman pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan terhadap pengurangan kemiskinan.

H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis yang telah peneliti kemukakan di atas, maka untuk menggambarkan alur pemikiran di sini peneliti menggambarkan melalui diagram sebagai berikut:



Dari gambar di atas dijelaskan bahwa adanya dalam Program KOTAKU dibagi menjadi 3 Bidang yaitu Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, dan Bidang Fisik. Pinjaman Bergulir ada dalam Bidang Ekonomi dimana pada bidang ekonomi ini pemberian modal pinjaman bergulir yang ada diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki usaha sehingga dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dengan indikator pengukuran penelitian ini menggunakan jumlah pinjaman pada variabel (X) yaitu Pinjaman Bergulir dan variabel (Y) yaitu Pendapatan yang dilihat dari

pendapatan KSM yang didapatkan dari tahun 2015-2017 dan bagaimana pinjaman bergulir dalam perspektif ekonomi Islam.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁹⁷

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah di jelaskan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_a : Pinjaman bergulir berpengaruh terhadap pendapatan pada program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

H_0 : Pinjaman bergulir tidak berpengaruh terhadap pendapatan pada program KOTAKU di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

⁹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁹⁸ Penelitian kuantitatif ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang relevan dengan obyek yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data tersebut maka penulis dalam hal ini mengadakan penelitian pada Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kecamatan Teluk Betung Utara. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan lamanya terhitung sejak tanggal 3 Juni 2018 pada saat pengambilan data pertama mengenai jumlah pinjaman bergulir yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara.

⁹⁸*Ibid*, h.7.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber dalam istilah teknisnya responden.⁹⁹Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada sejumlah responden yaitu pihak yang menjadi sampel dari penelitian ini yakni mengenai pengaruh pinjaman bergulir terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolaknya.¹⁰⁰Teknik dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan metode studi perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku catatan laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Pendapatan.

⁹⁹Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 37.

¹⁰⁰Soeranto, et. al. *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis* (Yogyakarta : UPP YKPN, 1990), h. 76.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 226 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mendapat Program Pinjaman Bergulir dari tahun 2015-2017 di Kecamatan Teluk Betung Utara.

2. Sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰¹ Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Kriteria pertimbangan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang masih terdaftar pada Program KOTAKU di Tahun 2015-2017
- b. KSM yang diberikan pinjaman rutin dari tahun 2015-2017
- c. KSM yang membayar angsuran rutin perbulan
- d. KSM yang terdapat 5 anggota dalam satu kelompok

Berdasarkan kriteria diatas, maka sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

¹⁰¹Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 84.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan pendefinisian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independent (X)

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pinjaman Bergulir yang dilihat melalui Jumlah Pinjaman dari tahun 2015-2017.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pendapatan Pada penelitian ini peneliti mengukur menggunakan pendapatan pada masing-masing KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dari tahun 2015-2017.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰²

Peneliti melakukan wawancara dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan dengan bagian Korkot-1 Kota Bandar Lampung pada

¹⁰²*Ibid*, h. 137.

Program KOTAKU guna memperoleh keterangan tentang data yang yang diperlukan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.¹⁰³

Peneliti melakukan observasi langsung di KSM Kecamatan Teluk Betung Utara yang mendapatkan pinjaman bergulir.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁰⁴ Selain itu dalam itu dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literature yang relevan, dengan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melalui penelusuran dokumentasi yang ada di perpustakaan, yang dikenal dengan sebutan *library research* (riset pustaka) adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.

¹⁰³ *Ibid*, h. 147.

¹⁰⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2009), h.73.

G. Metode Analisis Data

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov*.

- a. Jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data tersebut tidak normal.
- b. Jika signifikansi diatas 0,05 berarti data yang diuji tersebut normal.¹⁰⁵

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengertian analisis regresi adalah merupakan analisis mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien regresi, disimbolkan dengan (b). Sehingga semakin besar koefisien regresi menunjukkan sebesar besar pula pengaruhnya terhadap perubahan proporsional variabel terikat. Sebaliknya semakin kecil koefisien regresi, berakibat semakin kecil pula memengaruhi perubahan variabel terikat. Hal tersebut berlaku untuk koefisien regresi negative atau positif.¹⁰⁶

Analisis regresi linear sederhana mempunyai bentuk persamaan:

¹⁰⁵Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*, Cet. Ke-III, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2005), h.110.

¹⁰⁶Sunyoto Danang, *Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi*, (Jakarta: Buku Seru, 2012),h. 181.

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas.¹⁰⁷

3. Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dalam (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka besar proporsi dan total variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.¹⁰⁸

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KP = Nilai koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

jika (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat hubungan tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat.

¹⁰⁷Sugiyono, *Op.Cit*, h. 183.

¹⁰⁸*Ibid.* h. 228.

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur melalui *Goodness Of Fit*nya. Secara statistik hal ini dapat diukur melalui nilai statistik t dan nilai koefisien determinan. Apabila uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi persial individu yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen.

$$t_{hit} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t-hitung

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah data pengamatan

Dimana $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka H_0 diterima, dan jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_1 diterima, begitupun jika $sig > \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Teluk Betung Utara

a. Gambaran Umum Wilayah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung. Kota Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.761 jiwa (berdasarkan data tahun 2015), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung.¹⁰⁹

Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung, karena terletak di wilayah yang strategis dan merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, pariwisata.

¹⁰⁹<http://www.google.co.id/interstitial?url=http://pemetaan.perpusnas.go.id/library/demografi/570>, diakses pada, Selasa 21 Agustus 2018, Pukul 18.59WIB

Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Utara merupakan salah satu wilayah dalam Kota Bandar Lampung. Kecamatan Teluk Betung Utara terbentuk sejak tahun 1976, berada pada Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1994. Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012.

b. Wilayah Administratif

Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki luas wilayah 325,7 Ha. Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah kecamatan Teluk Betung Utara dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Kupang Kota
- 2) Kelurahan Kupang Raya
- 3) Kelurahan Kupang teba
- 4) Kelurahan Pengajaran
- 5) Kelurahan Gulak Galik
- 6) Kelurahan Sumur Batu

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Utara berada di Kelurahan Kupang Kota.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kota Bandar Lampung di tahun 2016 Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki jumlah penduduk 62.611 jiwa, akan tetapi berdasarkan data Profil Kecamatan Teluk

Betung Utara di tahun 2018 penduduknya 43.846 jiwa dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁰

Tabel 2.1
Data Menurut Umur Dan Jenis Kelamin
Kecamatan Teluk Betung Utara

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 Tahun	1.630	1.677	3.307
2	5 - 6 Tahun	1.518	1.538	3.056
3	7 - 13 Tahun	4.060	4.032	8.092
4	14 – 16 Tahun	3.548	3.538	7.086
5	17 – 24 Tahun	4.158	4.298	8.456
6	25 – 54 Tahun	4.339	4.049	8.338
7	55 Tahun Keatas	2.763	2.748	5.511
Jumlah		22.016	21.880	43.846

Sumber :Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

Jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Utara pada tahun 2018, yaitu sebesar 43.846 jiwa, terdiri dari 22.016 jiwa penduduk laki-laki dan 21.880 penduduk perempuan.

d. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan lading penghasilan yang didapat seseorang, mata pencaharian merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Teluk Betung Utara dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin
Kecamatan Teluk Betung Utara

No	Golongan Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	5.289	4.739	10.028
2	TNI	964	687	1.651
3	Dagang	2.715	2.792	5.507

¹¹⁰Profil Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

4	Tani	920	998	1.918
5	Tukang	2.788	986	3.774
6	Buruh	7.595	3.253	10.848
7	Pensiunan	1.685	1.489	3.174
8	Lain-lain	4.169	4.237	6.996
Jumlah		26.125	19.181	43.896

Sumber :Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara dengan pekerjaan sebagai Buruh sebanyak 10.848 jiwa, dan Tentara Negara Indonesia sebanyak 1.651 jiwa.

e. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan hal yang penting dalam menjamin keadaan hidup seseorang, karena agama merupakan pedoman dalam hidup, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluk masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara :

Tabel 2.3
Data Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Kecamatan teluk Betung Utara

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	18.095	20.127	36.924
2	Kristen Protestan	1.674	1.605	18.829
3	Kristen Khatolik	1.809	1.71	18.095
4	Budha	366	363	729
5	Hindu	338	361	699
Jumlah		22.282	23.627	75.276

Sumber :Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk memeluk agama Islam, seseorang dikatakan sejahtera juga tidak dapat terlepas dari persoalan agama, karena ketenangan hidup bersumber

juga dari pedoman atau agama yang dimiliki seseorang. Fasilitas peribadatan juga tak kalah penting dalam mendukung terciptanya kedamaian dalam beragama, fasilitas peribadatan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	30
2	Musholla	58
3	Gereja Protestan	2
4	Gereja Katolik	1
5	Pura	1
6	Vihara	2

Sumber :Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat semua prasarana peribadatan yang ada adalah penunjang peribadatan masyarakat yang memeluk agama Islam.

f. Kondisi Kesejahteraan Penduduk

Tabel 2.5
Data penduduk Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Kecamatan Teluk Betung Utara

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	1.243	986	2.229
2	Sarjana Muda	1.215	991	2.206
3	SLTA	5.564	5.489	11.053
4	SLTP	6.456	6.119	12.575
5	SD	4.991	5.109	10.100
6	Taman Kanak-Kanak	1.339	1.488	2.827
7	Belum Sekolah	1.345	1.561	2.906
Jumlah		22.153	20.749	43.896

Sumber :Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2018

Berdasarkan table di atas, penduduk Kecamatan Teluk Betung Utara dengan tingkat pendidikan SLTP 12.575 jiwa.Sedangkan jumlah

penduduk dengan tingkat pendidikan Sarjana Muda adalah yang terkecil, hanya berjumlah 2.206 jiwa saja. Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Utara juga dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Berikut ini dapat dilihat prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara :

Tabel 2.6
Jumlah Prasarana Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Utara

No	Pendidikan Formal	Jumlah	Pendidikan Formal Keagamaan	Jumlah
1	SD	15	MI	1
2	SMP	10	MTs	1
3	SMA/SMK	11	MA	1

Sumber : Profil Kecamatan Teluk Betung Utara 2016

Berdasarkan tabel diatas prasarana pendidikan yang dimiliki Kecamatan Teluk Betung Utara sudah cukup lengkap, dikarenakan semua sekolah baik dari pendidikan formal umum sampai pendidikan formal keagamaan tersedia di Kecamatan Teluk Betung Utara dan dari segi tingkatan sudah cukup mencakup dari SD sampai SMA sederajat.

g. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menggambarkan tingkat kualitas hidupnya. Prasarana kesehatan juga sangat penting dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sarana

kesehatan yang dimiliki Kecamatan Teluk Betung Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Poliklinik	1
3	Puskesmas	8
4	Rumah Bersalin	2
5	Praktek Dokter	7

Sumber :Profil Kecamatan Teluk Betung Utara 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara sudah cukup mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, mengingat Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki letak yang strategis yakni berada di pusat kota.

B. Deskripsi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan dokumentasi pada program KOTAKU di Korkot I Kota Bandar Lampung dan mewawancarai responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel, yaitu di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, tepatnya pada 2 Kelurahan yaitu Kupang Raya dan Gulak Galik. Proses wawancara ini dilakukan kurang lebih satuminggu, yaitu dari tanggal 14 September 2018 sampai dengan 21 September 2018.

C. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil survei wawancara kepada responden dapat diketahui komposisi responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	%
Laki-Laki	2	18,2%
Perempuan	9	81,8%
Jumlah	11	100%

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, diperoleh profil responden berdasarkan jenis kelamin sebagaimana nampak dalam table 2.8 menunjukkan bahwa dari 11 KSM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang (18,2%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang (81,8%). Dari angka tersebut menggambarkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi sampel didominasi oleh Perempuan dari jumlah sampel yang ada.

2. Usia

Berdasarkan hasil survei wawancara kepada responden dapat diketahui komposisi responden menurut usia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9**Usia**

Usia	Frekuensi (Orang)	%
30-40	3	27,3%
41-50	3	27,3%
51-60	4	36,4%
61-70	1	9%
Jumlah	11	100%

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, diperoleh profil responden berdasarkan usia sebagaimana nampak dalam table 2.9 menunjukkan bahwa dari 11 KSM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, responden yang berumur 30-40 tahun sebanyak 3 orang atau 27,3%, 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 27,3%, 51-60 tahun sebanyak 4 orang atau 36,4%, 61-70 tahun sebanyak 1 orang atau 9%. hal ini dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi sampel didominasi oleh KSM yang berumur antara 51-60 Tahun.

3. Status Pendidikan

Berdasarkan hasil survei wawancara dapat diketahui komposisi responden menurut status pendidikan, dapat dilihat pada table 1.11, sebagai berikut :

Tabel 2.10**Status Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	%
SMP	4	36,4%
SMA	7	63,6%
Jumlah	11	100%

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, diperoleh profil responden berdasarkan status pendidikan sebagaimana nampak dalam table 2.10 menunjukkan bahwa dari 11 KSM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, responden yang berstatus pendidikan SMP sebanyak 4 orang atau 36,4% dan SMA sebanyak 7 orang atau 63,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi sampel didominasi oleh KSM yang berstatus pendidikan SMA.

4. Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil survei wawancara dapat diketahui komposisi responden menurut status pekerjaan, dapat dilihat pada table 1.12, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	%
Pedagang	10	90,9%
Penjahit	1	9,1%
Jumlah	11	100%

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, diperoleh profil responden berdasarkan status pendidikan sebagaimana nampak dalam table 2.11 menunjukkan bahwa dari 11 KSM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, responden yang bekerja sebagai Pedagang sebanyak 10 orang atau 90,9% dan penjahit sebanyak 1 orang atau 9,1%. Halini dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) yang menjadi sampel didominasi oleh KSM yang berstatus pekerjaan sebagai pedagang.

D. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan nilai signifikannya. Jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

Tabel 2.12

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1507.76676400
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.064
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengertian analisis regresi adalah merupakan analisis mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien regresi, disimbolkan dengan (b). Sehingga semakin besar koefisien regresi menunjukkan sebesar besar pula pengaruhnya terhadap perubahan proporsional variabel terikat. Sebaliknya semakin kecil koefisien regresi, berakibat semakin kecil pula memengaruhi perubahan variabel terikat. Hal tersebut berlaku untuk koefisien regresi negative atau positif. Regresi linear Sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 2.13 berikut :

Tabel 2.13

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8549.429	611.898		.000
	Pinjaman Bergulir	1.525	.557	.441	.010

a. Dependent Variabel: Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2.13 diatas diperoleh persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 8549.429 + 1,525 X$$

Keterangan :

X= Pinjaman Bergulir

Y= Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta dari persamaan tersebut adalah 8549.429 Variabel penerapan Pinjaman Bergulir mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap peningkatan pendapatan kelompok swadaya masyarakat
2. Koefisien penerapan pinjaman bergulir memberi nilai 1,525 yang berarti jika pinjaman bergulir semakin meningkat maka tingkat pendapatan kelompok swadaya masyarakat mengalami peningkatan.
3. Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dalam (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Detreminan (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka besar proporsi dan total variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R^2 . Hasil uji determinasi sebagai berikut :

Tabel 2.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 ^a	.195	.169	1531.893

a. Predictors: (Constant), Pinjaman Bergulir

b. Dependent Variabel: Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Berdasarkan hasil pinjaman bergulir yang mempengaruhi pendapatan kelompok swadaya masyarakat pada tabel 2.14 di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,169. Hal ini berarti variabel bebas yaitu Pinjaman Bergulir (X) mempunyai kontribusi sebesar 16,9% terhadap variabel terikat yaitu pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat (Y).

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur melalui *Goodness Of Fit*nya. Secara statistik hal ini dapat diukur melalui nilai statistik dan nilai koefisien determinan. Apabila uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi persial individu yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Pinjaman Bergulir) secara individual mempengaruhi variabel dependen(Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat).

Tabel 2.15
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8549.429	611.898		13.972	.000
	Pinjaman Bergulir	1.525	.557	.441	2.739	.010

a. Dependent Variabel: Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat

Sumber : Hasil Pengolaha Data SPSS (2018)

Hasil dari pengujian SPSS untuk variabel Pinjaman Bergulir (X) terhadap Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat(Y) diperoleh nilai thitung sebesar 2,739sedangkan ttabel sebesar 1,69389 di mana nilai tersebut ditentukan dengan rumus $n - k$ (n = banyaknya responden, sedangkan k = banyaknya variabel bebas dan terikat). Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel ($2,739 > 1,69389$). Dan karena nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji t, maka dapat disimpulkan pula bahwa H_0 ditolak, artinya Pinjaman Bergulir (X)

memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat (Y).

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pinjaman bergulir terhadap pendapatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Dari hasil persamaan regresi dilihat pada tabel 2.13, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pinjaman bergulir sebesar 1,525 selain itu signifikan $0,010 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pinjaman Bergulir (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat (Y).

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian diganti. Sedangkan “Pinjaman Bergulir” menurut program KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini merupakan pemberian pinjaman skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa

dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya program pinjaman bergulir ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan pendapatan dari pinjaman bergulir sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Program pinjaman bergulir yang ada pada beberapa KSM di Kecamatan Teluk Betung Utara rata-rata dari jumlah sampel, pinjaman digunakan untuk usaha berdagang sebanyak 90,9% dan 9,1% usaha sebagai penjahit. Ada beberapa KSM yang mendapatkan pinjaman 2 kali dalam satu tahun, karena lama waktu pinjaman selama 10 bulan angsuran. Dimana pada pinjaman ini terdapat sistem tanggung renteng yang digunakan untuk pelunasan bulan ke-10. Pada program ini pemberian pinjaman tidak menggunakan jaminan, hanya saja menyerahkan bukti KTP, Kartu Keluarga dan memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat minimal 5 orang 1 kelompok KSM sebagai syarat pengajuan pinjaman. Program pinjaman bergulir ini membantu KSM dalam mengembangkan usaha sehingga meningkatkan pendapatan, tetapi ada beberapa KSM yang sulit untuk mengembangkan usahanya karena jumlah dana yang diberikan untuk pinjaman terlalu kecil sehingga untuk mengembangkan usahanya masih kekurangan modal, jumlah penjualan yang tidak meningkat, dan

persaingan yang sulit dikarenakan banyaknya usaha yang homogen (sama). Seperti kebanyakan usaha sebagai pedagang kelontongan. Sehingga dengan kurangnya jumlah pinjaman yang diberikan Program KOTAKU berpengaruh kepada tingkat pendapatan KSM.

Menurut kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Sedangkan pendapatan atau laba adalah perbedaan antara pendapatan kotor (*gross income*) dan biaya operasi (*operating cost*). Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai usaha, yang merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan uang tunai atau pendapatan (keuntungan) usaha merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua biaya. Pendapatan juga merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang

yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Menurut Arifin Sitio & Halomoan Tamba dalam penelitian ekonomi, kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.

Dari data dokumentasi pada Program KOTAKU yang didapatkan bahwa sebagian besar KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) setelah mengikuti Program KOTAKU yaitu pada pinjaman bergulir pendapatan KSM dari tahun 2015-2017 rata-rata meningkat. Yang dapat dilihat pada tabel 2.16 dan grafik berikut ini :

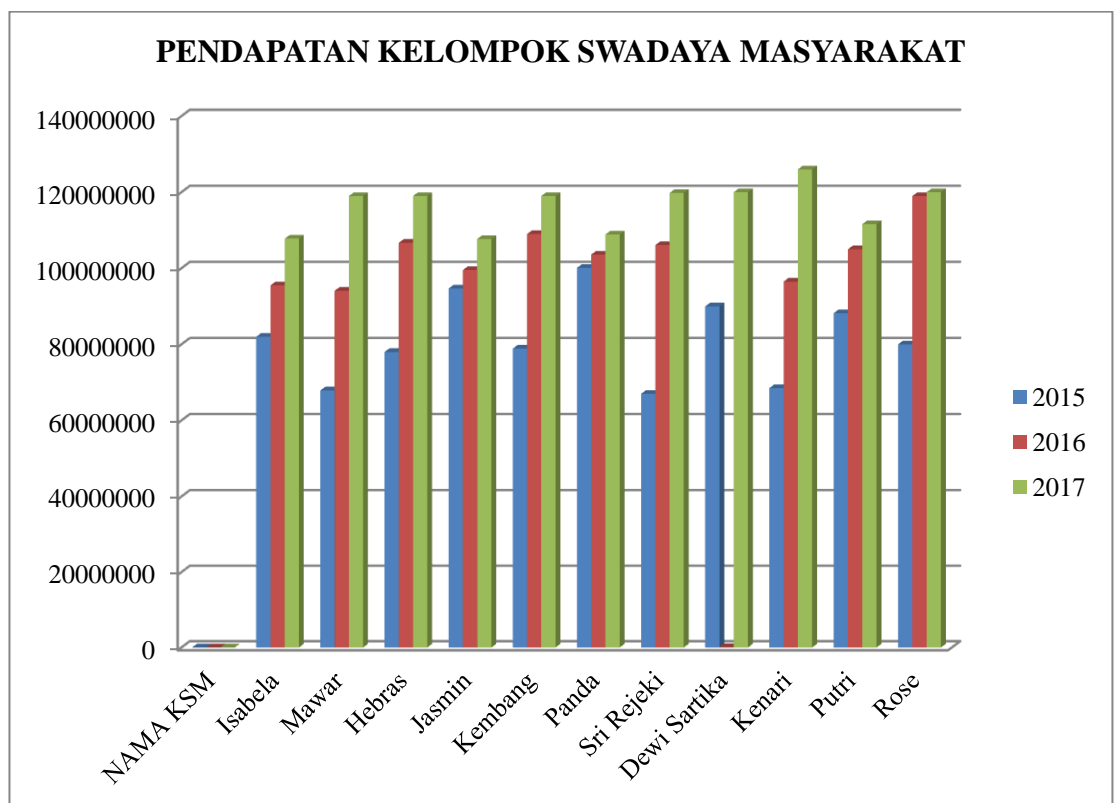
Tabel 2.16
Jumlah Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat

NO	NAMA KSM	PENDAPATAN		
		2015	2016	2017
1	Isabela	Rp 82,000,000.00	Rp 95,500,000.00	Rp 107,800,000.00
2	Mawar	Rp 67,900,000.00	Rp 94,100,000.00	Rp 119,000,000.00
3	Hebras	Rp 78,000,000.00	Rp 106,700,000.00	Rp 119,000,000.00
4	Jasmin	Rp 94,700,000.00	Rp 99,550,000.00	Rp 107,700,000.00
5	Kembang	Rp 78,900,000.00	Rp 109,000,000.00	Rp 119,000,000.00
6	Panda	Rp 100,100,000.00	Rp 103,600,000.00	Rp 108,900,000.00
7	Sri Rezeki	Rp 67,000,000.00	Rp 106,100,000.00	Rp 119,800,000.00
8	Dewi Sartika	Rp 90,000,000.00	Rp 110,000,000.00	Rp 120,000,000.00
9	Kenari	Rp 68,500,000.00	Rp 96,500,000.00	Rp 126,000,000.00
10	Putri	Rp 88,200,000.00	Rp 105,000,000.00	Rp 111,600,000.00
11	Rose	Rp 80,000,000.00	Rp 119,000,000.00	Rp 120,000,000.00

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan UPK dan Faskel Ekonomi
Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 2.16 menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh beberapa KSM yang menjadi sampel mengalami peningkatan dari tahun-ketahun setelah mendapatkan pinjaman bergulir yang bisa dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.4 Pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat Tahun 2015-2017



Dari hasil wawancara kepada responden pada penelitian ini pinjaman pertahun yang di dapatkan oleh KSM digunakan untuk mengelola usaha agar usaha yang dijalankan berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dimana pendapatan dari tahun 2015-2016 meningkat, tetapi pendapatan yang diperoleh oleh KSM tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Penyebabnya karena jumlah dana yang diberikan untuk

pinjaman terlalu kecil sehingga untuk mengembangkan usahanya masih kekurangan modal, jumlah penjualan yang tidak meningkat, dan persaingan yang sulit dikarenakan banyaknya usaha yang homogen (sama).

Dari hasil pembahasan penelitian diatas pinjaman bergulir ini memiliki pengaruh yang kecil terhadap pendapatan KSM sebesar 16,9 % yang dilihat dari tabel dan grafik diatas tingkat pendapatan dari tahun 2015-2017 dikarenakan masih belum berjalan lancarnya program pinjaman bergulir ini di masyarakat karena masih ada beberapa KSM yang menunggak dan kurangnya jumlah dana yang diberikan untuk pinjaman dari program KOTAKU ini.

2. Pinjaman Bergulir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, pinjaman disebut dengan *al-qardh*. Secara terminologi berarti memotong. Karena pinjaman adalah bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Pinjaman pun berarti harta yang diberikan dan harus di kembalikan lagi. Secara terminologi ia berarti memberikan harta sebagai bantuan bagi orang yang memerlukan untuk kemudian diganti.

Menurut ulama Hanafiah, *al-Qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk

dikembalikan sepadan dengan itu.¹¹¹ Sedangkan menurut ulama malikiyah, *al-Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.¹¹² Terdapat rukun dan syarat hutang piutang (*al-Qard*) yaitu :

a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*), merupakan orang *ahliyah mu'amalah*, yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).¹¹³

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqid*)

Syarat *muqid* (pihak yang memberikan pinjaman) antara lain :

1) *Ahliyat at-tabarru'* (layak sosial), artinya orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat Islam.

2) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan), *Muqid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi pihak ketiga.¹¹⁴

c. Barang yang dihutangkan (*Muqtarad/ma'qud 'alaih*)¹¹⁵

d. Ucapan serah terima (*Sighat Ijab Qabul*), adalah semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan

¹¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.374.

¹¹²Azharudin Lathif, *Op. Cit.*, h.150.

¹¹³Dumairi Nor, Sufandi *Op. Cit.*, h.103.

¹¹⁴*Ibid.*, h.102.

¹¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.278.

qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima.¹¹⁶ *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad, *Sighat* akad dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.¹¹⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat barang yang dihutangkanyaitu : Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, telah ada pada waktu perjanjian. Ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam salah satunya adalah prinsip tertulis (*Al-Kitabah*) dimana Prinsip ini didasari dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... ” (Q.S Al-Baqarah ayat (2): 282)¹¹⁸

Menurut Imam Syafi'i berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasannya yang dimaksud piutang adalah meminjam atau memberi pinjaman yang merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah.

¹¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h.65.

¹¹⁷ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.104.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.145.

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan beberapa aturan kepada hamba-Nya apabila mereka bermuamalah dengan cara utang piutang dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah menulis perjanjian dengan menghadirkan dua orang saksi yang mampu bersifat adil.¹¹⁹ Dan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dimana juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja. Hendaknya yang memberi utang mengutarakan maksudnya agar ditulis dan tidak mengurangi sedikitpun hak orang lain demi kepentingan pribadi.¹²⁰ Dari ayat tersebut terdapat pelajaran yang dapat dipetik yaitu¹²¹:

1. Transaksi bukan tunai, janganlah ditegaskan atas janji lisan melainkan dengan tertulis dan mengambil kesaksian.
2. Dengan jalan membayar utang tepat pada waktunya, berarti kita telah memelihara kepercayaan dan keamanan ekonomi masyarakat terjaga.

Sehingga ayat tersebut mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, dan akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*).¹²² Seperti pada salah satu prinsip ekonomi Syariah.

Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan

¹¹⁹ Syaikh Ahmad, *Op. Cit.*, h. 522

¹²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, h. 127.

¹²¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, h. 138.

¹²² Amran Suadi, *Op. Cit.*, h. 158.

muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Prinsip tertulis (kitabah) ini dalam lembaga keuangan yang tertuang dalam ilmu akuntansi, dimana ilmu akuntansi adalah ilmu yang melihat suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data-data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Dan dari akhir kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dari suatu organisasi atau kesatuan ekonomi ini merupakan tujuan utama dari kegiatan akuntansi.¹²³ Pada lembaga keuangan syariah terdapat prinsip dasar akuntansi syariah yaitu Prinsip Pertanggungjawaban, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Kebenaran.¹²⁴

Pada program pinjaman bergulir terdapat pembukuan laporan keuangan dan laporan-laporan kegiatan pinjaman bergulir seperti pada saat penyerahan pinjaman maupun pada saat pembayaran angsuran yang di catat dan dikerjakan oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan) pada setiap Kelurahan yang mendapatkan pinjaman bergulir, dan merekalah yang bertugas untuk mencatat/membukukan setiap laporan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) bekerjasama dengan fasilitator ekonomi dalam hal pembukuan untuk mempermudah saat pengauditan, sehingga pada saat pembukuan pinjaman bergulir harus dicatat dengan benar sesuai dengan kegiatan yang ada, selain itu

¹²³Rita Eni Purwati & Indah Nugraheni, *Siklus Akuntansi*, (Yogyakarta: Kanisusu, 2001), h.2

¹²⁴*Ibid*, h.62.

dengan adanya pembukuan yang di lakukan oleh UPK itu juga digunakan untuk dokumentasi apabila terdapat KSM yang telat dalam pembayaran angsuran setiap bulannya dan sebagai pengingat baik untuk pihak yang memberi pinjaman (UPK) maupun pihak yang mendapatkan pinjaman (KSM). Seperti pada teori ekonomi Islam yang telah diuraikan diatas bahwa transaksi yang tidak tunai atau mengangsur janganlah ditegaskan dengan lisan tetapi dengan tulisan seperti terdapatnya pembukuan yang ada pada pinjaman bergulir ini agar terjaganya kepercayaan dan keamanan masyarakat apabila terdapat kesalahpahaman dalam proses pinjaman bergulir karena terdapat bukti tertulis yang ada pada UPK.

Meskipun pinjaman begulir ini bukanlah lembaga keuangan, melainkan program pemerintah, tetapi ada beberapa prosedur dan proses serta syarat pada program pinjaman bergulir ini yang memiliki beberapa kesamaan dengan akad yang ada pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad *al-Qard* (pinjaman) dimana rukun dan syarat yang ada pada program pinjaman bergulir ini terdapat pihak yang meminjam yaitu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki usaha dan mampu untuk mengembalikan pinjaman yang ada, dan pihak yang memberikan pinjaman dalam program ini adalah UPK yang berada di setiap kelurahan yang terdapat program pinjaman bergulir ini yang dananya berasal dari program KOTAKU, dan pada saat penyerahan uang telah

ada pada saat perjanjian yang telah disepakati oleh pihak peminjam (UPK) dan pihak yang diberi pinjaman (KSM) dan sesuai dengan jumlah pinjaman, selain itu terdapat ucapan serah terima/ *Sighat Ijab Qabul* pada saat penyerahan uang pinjaman.

Pada program pinjaman bergulir terdapat salah satu syarat dalam pengajuan pinjaman yaitu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 5 orang. Pada kelompok tersebut terdapat tanggung jawab sosial dimana apabila dalam satu kelompok terdapat salah satu anggota yang tidak membayar angsuran/pinjaman, maka akan membuat kelompok tersebut mendapatkan sanksi yaitu kelompoknya akan dikategorikan macet/menunggak sehingga pada perguliran dana/pencairan pinjaman tahun berikutnya, KSM tersebut akan diperhitungkan kembali apakah akan diberikan pinjaman lagi atau dikurangi jumlah pinjamannya. Sehingga dengan begitu dalam satu kelompok tersebut harus saling bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam pembayaran pinjaman. Seperti yang ada pada prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*) prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daudlah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.¹²⁵

¹²⁵*Ibid.*, h.6.

Selain itu pemerintah bertanggung jawab dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tanggung jawab yang pemerintah lakukan adalah salah satunya membantu masyarakat melalui program KOTAKU ini yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu pinjaman bergulir ini pun diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya yang sesuai dengan prinsip kemanfaatan (*A-Manfaat*) atau kemaslahatan (*maslahah*) dalam ekonomi Islam, Prinsip ini dimaksudkan akad yang dilakukan oleh para pihak dalam ekonomi syariat bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Dimana program ini adalah program pemerintah yang tidak mengambil keuntungan, yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, bahkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kemaslahatan umat. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.¹²⁶

¹²⁶*Ibid.*, h.66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji terdapat pengaruh positif dan signifikan pinjaman bergulir terhadap pendapatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sebesar 16,9% yang dilihat dari pendapatan per tahun selama 3 tahun. Sehingga pinjaman bergulir ini mampu membantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk meningkatkan pendapatannya.
2. Terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam pada pinjaman bergulir yang ada di Program KOTAKU yaitu prinsip tertulis (*Al-Kitabah*), prinsip pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*) dan prinsip kemanfaatan (*A-Manfaat*) atau kemaslahatan (*maslahah*).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, melihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh Program KOTAKU yaitu pinjaman bergulir terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat (KSM), diharapkan pemerintah lebih besar memberikan modal agar tingkat pendapatan masyarakat lebih tinggi. Sehingga program ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lancar agar masyarakat dapat lebih sejahtera karena adanya program pinjaman

bergulir ini memberikan modal bagi masyarakat untuk meningkatkan usahanya dan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah referensi untuk kegiatan guna menambah wawasan serta pengetahuan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memperluas variabel dan pengukuran variabel penelitian, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat tentang pengaruh pinjaman bergulir terhadap pendapatan kelompok swadaya masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad.Syaikh *Tafsir Imam Syafi'I*.(Jakarta: Almahira. 2001).
- Alimuddin, Ilyas. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*.diakses pada <http://makasar.tribunnews.com>. (diakses pada tanggal 03 April 2018).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa.*Tafsir Maraghi, terj.Bahrin Abubakar*.(Surabaya: CV. Aisyiah. 1998).
- *Tafsir Al-Maraghi*.(Semarang: Toha Putra. 1986).
- Az-Zuhaili, Wahbah.*Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. (Jakarta: Gema Insani Sidogiri. 2007).
- Badan Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat per Provinsi*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2010).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*.(Yogyakarta: VII press. 2000).
- Danang, Sunyoto.*Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi*. (Jakarta: Buku Seru. 2012).
- Departemen Agama Republik Indonesia.*Al-Quran dan Terjemahannya*.(Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*.(Bandung: PT Refika Aditama. 2012).
- Firdaus, Rachmat & Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*.(Bandung: Alfabeta. 2017).
- Fitriani Prastiawati Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan Program Ekonomi Bergulir* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2010), h.3.& Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Perdagangan Pasar Tradisional”. Vol.17 No.2(Juli 2016).
- Fuad, M. et. al., *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Utama. 2006).

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Cet.Ke-III. (Semarang:Penerbit UNDIP. 2005).
- Hartono, Budi. *Prinsip Analisis Ekonomi (Teori dan Aplikasi Peternakan)*. (Malang: Universitas Brawijaya Press. 2016).
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.(Jakarta: Raja Gravindo. 2003).
- Ikit .*Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*.(Yogyakarta: Deepublish. 2015).
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Kasmir.*Managemen Perbankan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012).
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Pedoman Pelaksanaan Program Ekonomi Bergulir*.(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya. 2010).
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005).
- Mauludi AC, Ali. “Akuntansi Syariah Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif”.*Iqtishadia* Vol. 1 No.1 Juni 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*., (Jakarta: Amzah. 2010).
- Marbun, BN. *Kamus Manajeme*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Cet. Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013).
- Nor, Dumairi.Sufandi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*.(Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2007).
- Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1 No.1, Februari 2013, Dewi Irawati, et. al.
- Perpustakaan BPS Kota Bandar Lampung. *Angka Kemiskinan Lampung*. September 2017.
- Purwati, Rita Eni & Indah Nugraheni. *Siklus Akuntansi*.(Yogyakarta: Kanisusu. 2001).

- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: Bina Grafika. 2004).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby. 1995).
- Sanrego, Yulizar & D. Moch Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan) "Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah"*. (Jakarta: Qisthi Press. 2016).
- Sarwono. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT.Gramedia. 2012).
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2017).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Sitio, Arifin & Halomoan Tamba. *Koperasi :Teori dan Praktek*. (Erlangga: Jakarta. 2001).
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2018).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: CV Pustaka Setia. 2009).
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sumito, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet. Keempat. (Jakarta: Raja grafindo Persada. 2010).
- Soeranto. et. al. *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis*. (Yogyakarta : UPP YKPN. 1990).
- Swastha, Basu. *Manajemen Pemasaran I Edisi Ketiga*. (Yogyakarta : BPFF. 2001).
- Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999).
- Wibowo, Martino & Ahmad Subagyo. *Seri Manajemen koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik*. (Yogyakarta: CV.Budi Utama. 2017).
- Widjajanta, Bambang. et. al. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. (Bandung: Citra Praya. 2007).

- “Pemetaan”.<http://www.google.co.id/interstitial?url=http://pemetaan.perpusnas.go.id/library/demografi/570>, (diakses pada Selasa 21 Agustus 2018)
- “Pengertian Pinjaman Bergulir”, <http://kotaku.pu.go.id/>, (diakses pada 27 Maret 2018). Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
- “Sejarah P2KP”. <http://www.p2kp.org/>. (diakses pada 27 Maret 2018). dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
- “14 Kriteria Miskin BPS”.<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> (diakses pada 03 April 2018)



LAMPIRAN



Lampiran 4

Lampiran Data Pinjaman dan Pendapatan

NO	NAMA KSM	KELURAHAN	VARIABEL X (Dependen)			VARIABEL Y (Independen)		
			PINJAMAN			PENDAPATAN		
			2015	2015	2016	2017	2016	2017
1	Isabela	Gulak-Galik	Rp. 7,500,000.00	Rp. 82,000,000.00	Rp. 95,500,000.00	Rp.107,800,000.00	p.20,000,000.00	Rp.10,000,000.00
2	Mawar	Gulak-Galik	Rp. 2,500,000.00	Rp. 67,900,000.00	Rp. 94,100,000.00	Rp.119,000,000.00	Rp.10,000,000.00	Rp. 5,000,000.00
3	Hebras	Kupang Raya	Rp. 3,000,000.00	Rp. 78,000,000.00	Rp.106,700,000.00	Rp .119,000,000.00	Rp.10,000,000.00	Rp.12,000,000.00
4	Jasmin	Kupang Raya	Rp. 6,000,000.00	Rp. 94,700,000.00	Rp. 99,550,000.00	Rp.107,700,000.00	Rp.20,000,000.00	Rp.11,000,000.00
5	Kembang	Kupang Raya	Rp.10,000,000.00	Rp. 78,900,000.00	Rp.109,000,000.00	Rp.119,000,000.00	Rp.12,000,000.00	Rp.12,000,000.00
6	Pandan	Kupang Raya	Rp.16,000,000.00	Rp.100,100,000.00	Rp.103,600,000.00	Rp.108,900,000.00	Rp.10,000,000.00	Rp.10,000,000.00
7	Sri Rezeki	Kupang Raya	Rp. 7,000,000.00	Rp. 67,000,000.00	Rp.106,000,000.00	Rp.119,800,000.00	Rp.12,000,000.00	Rp. 6,000,000.00
8	Dewi Sartika	Kupang Raya	Rp. 6,000,000.00	Rp.90,000,000.00	Rp.110,000,000.00	Rp.120,000,000.00	Rp.18,000,000.00	Rp.10,000,000.00
9	Kenari	Kupang Raya	Rp. 5,000,000.00	Rp.68,500,000.00	Rp. 96,500,000.00	Rp.126,000,000.00	Rp. 7,500,000.00	Rp.20,000,000.00
10	Putri	Kupang Raya	Rp. 5,000,000.00	Rp.88,200,000.00	Rp.105,000,000.00	Rp.111,600,000.00	Rp.11,000,000.00	Rp. 8,000,000.00
11	Rose	Kupang Raya	Rp. 4,000,000.00	Rp.80,000,000.00	Rp.119,000,000.00	Rp.120,000,000.00	Rp.15,000,000.00	Rp. 5,000,000.00

